

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO HUKUM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EFIE EKA WANTY
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
3. NHK : 789783

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/123 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/36 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 213.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU JEEP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO METIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 312.917.124**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.375.917.124**III. HUTANG** Rp. 186.680.992**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.189.236.132

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.